



# Sangat Rendah Serapan APBD

Bangli (Bali Post) -

Serapan APBD Bangli tahun 2017 hingga akhir Mei ini masih sangat rendah. Dari target 46,16 persen, realisasi fisik dari 30 organisasi perangkat daerah (OPD) baru mencapai 33,55 persen. Rendahnya serapan APBD salah satunya dipengaruhi akibat adanya kebijakan Bupati untuk menunda sejumlah proyek bernilai Rp 200 juta.

Kabag Pembangunan Setda Bangli Wayan Sugiarta saat ditemui Selasa (4/7) kemarin mengatakan, hingga akhir Mei, realisasi fisik dari 30 OPD baru mencapai 33,55 persen. Sementara target yang dipasang untuk realisasi fisik hingga akhir Mei, yakni 46,16 persen. "Sedangkan untuk realisasi serapan keuangan baru mencapai 19,90

persen dari target 42,37 persen," ungkapnya.

Sugiarta menjelaskan, dari 30 OPD yang ada, OPD yang serapan fisiknya paling tinggi, yakni DPRD Bangli. Sampai akhir Mei, serapan anggaran di DPRD Bangli sudah mencapai 51,47 persen. Posisi kedua ditempati Dinas Perhubungan yang serapannya sudah mencapai 46

persen. "OPD yang serapannya paling rendah, yakni Dinas PU. Hingga akhir Mei baru mencapai 7 persen," jelasnya.

Menurut Sugiarta, ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya serapan APBD tahun ini. Salah satunya akibat adanya penundaan kegiatan proyek untuk kegiatan bernilai Rp 200 juta yang sumber

pendanaannya tidak mengikat seperti dari Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan Bupati untuk menunda kegiatan bernilai Rp 200 juta dilakukan guna menutupi kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2016 yang tak ditransfer pusat.

Selain itu, rendahnya serapan APBD juga disebabkan karena pada tahun ini sedang masa transisi penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 ke PP No. 18 Tahun 2016. Akibat adanya perubahan PP tersebut, terjadi perubahan kelembagaan dalam

OPD yang cukup berpengaruh terhadap kegiatan untuk tahun 2017.

"Pada saat perencana kan dilakukan OPD lama. Sementara pelaksanaannya dilakukan OPD baru sehingga ada sejumlah kesalahan," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Sugiarta mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengejar agar APBD bisa diserap semua OPD sesuai target per bulannya. "Dengan adanya target yang kita buat, kita harapkan serapannya tidak numpuk di akhir tahun," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Rabu 8 Juli 2017

Hal

: Hal. 2



## Kasus OTT di PMPPTSP

# Polisi Datangi

# Kantor BKD

Gianyar (Bali Post) -

Polda Bali kembali turun ke Pemkab Gianyar, tepatnya ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gianyar, Jumat (7/7) kemarin. Kedatangan kali ini untuk melanjutkan penyelidikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Kabupaten Gianyar.

Informasi dihimpun, secara diam-diam sejumlah personel Polda Bali mendatangi kantor BKD Gianyar sekitar pukul 11.30 Wita. Kedatangan mereka guna menelusuri aliran dana pungli yang dilakukan tersangka Ketut Mudana (Kepala Dinas PMPPTSP)

dan Nyoman Sukarja (Kabid Perizinan dan Non Perizinan). Namun tidak banyak diketahui apa saja yang digali aparat kepolisian di kantor yang beralamat di Jalan Kebo Iwa, Gianyar itu. Tim lantas kembali ke Mapolda Bali satu jam kemudian.

Kepala BKD Gianyar Ketut Artawa yang coba dikonfirmasi sore kemarin berulang kali tidak menjawab panggilan di telepon selulernya. Sementara itu, Kasubdit III (Tipikor) Polda Bali AKBP Ida Putu Wedanajati yang dikonfirmasi membenarkan bahwa polisi mendatangi Kantor BKD Gianyar siang kemarin. Dikatakannya, kedatangan ke lokasi tersebut untuk melanjutkan penyelidikan kasus OTT di Dinas PMPPTSP. "Ya tadi (kemarin - red) ada anggota ke sana melanjutkan penyelidikan, hanya untuk

konfirmasi," ucapnya.

Disinggung kedatangannya ke Kantor BKD Gianyar serta keterkaitan dengan kasus pungli di Dinas PMPPTSP Gianyar, AKBP Wedanajati enggan membeberkan lebih lanjut. "Itu belum bisa kami sampaikan. Yang jelas karena ada keterkaitan sehingga kami turun ke sana (Kantor BKD Gianyar - red)," katanya.

Diberitakan sebelumnya, AKBP Wedanajati mengatakan kedua tersangka kasus pungli di Dinas PMPPTSP masih bungkam. Oleh kar-

ena itu pihaknya masih fokus mendalami keterangan kedua tersangka tersebut. "Kami tidak boleh memaksa, kalau dipaksa entar dibilang kriminalisasi," ungkapnya.

Bahkan, ia menegaskan, sampai saat ini belum ada pejabat lain yang disebutkan terlibat kasus itu oleh tersangka. "Belum ada seperti itu, apalagi sampai menyebut Bupati dan Wakil Bupati. Tidak ada," ujarnya. Jika hal itu nantinya terungkap di persidangan, tentu pihaknya harus menindaklanjutinya. (kmb35/kmb36)

Edisi : Sabtu, 8 Juli 2017

Hal : 9



## Dukung Pembangunan Wantilan Pura Dalem Bupati Giri Prasta Serahkan Dana Hibah Rp 2 Miliar di Auman



**MENYERAHKAN** - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana hibah sebesar Rp 2 miliar kepada Desa Adat Auman, Desa Plaga, Kecamatan Petang, bertempat di Wantilan Pura Desa Adat

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana hibah sebesar Rp 2 miliar kepada Desa Adat Auman, Desa Plaga, Kecamatan Petang bertempat di

Auman, Kamis (6/7) lalu. Penyerahan dana hibah yang digunakan untuk pembangunan Wantilan di Pura Dalem Desa Adat Auman dihadiri Camat Petang I.B. Nata Manuaba beserta Muspika

Kecamatan Petang, Perbekel Plaga Gusti Lanang Umbara, Wakil Ketua Pengurus DPC PDI Perjuangan Badung Bagus Alit Sucipta dan tokoh masyarakat setempat. Bupati Badung I Nyoman

Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan, disadari waktu dan dana masyarakat kebanyakan habis untuk yadnya. Untuk itu, Pemkab Badung dengan DPRD Badung selalu hadir di tengah-tengah masyarakat guna mendukung seluruh pembangunan di desa maupun desa adat. Penyerahan bantuan hibah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan di desa, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya," tegasnya.

Bupati Giri Prasta juga telah mengambil kebijakan untuk menuntaskan seluruh pembangunan di pura kahyangan tiga desa adat di Badung dan mulai tahun 2018 nanti, Bupati juga mengambil kebijakan untuk memberikan gaji kepada pemangku pura kahyangan tiga se-Badung. Lebih lanjut Giri Prasta menyampaikan, berkaitan dengan mekanisme penyerahan bantuan hibah ini telah sesuai dengan *by name by adress* dan telah ditetapkan

di APBD, ada verifikasi begitu pula telah dibuatkan NPAD. "Setelah NPAD masuk ke rekening panitia yang uangnya telah masuk di Bank BPD Bali, hari ini secara simbolis yang dimaksud dengan *upasaksi* di antaranya *dewa saksi*, *manusa saksi* serta *buta saksi*. Salah satu pola kita hari ini adalah manusa saksi yang ditunjukkan kepada masyarakat desa adat bahwa uangnya telah terealisasi, agar dipergunakan sebaik-baiknya dan tidak ada korupsi. Dengan bantuan hibah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di desa adat," ujarnya.

Sementara itu, Bendesa Adat Auman I Wayan Terima menyampaikan rasa syukur dan merupakan kebanggaan bersama atas pemberian bantuan dana hibah ini untuk pembangunan wantilan yang merupakan kebutuhan masyarakat. "Ke depan masyarakat akan selalu mendukung program-program pemerintah dan arahan Bupati," katanya. (ad625)

Edisi : Sabtu, 8 Juli 2017

Hal : 3



## Penyidikan Dua Kasus Pungli Dihentikan

**Tabanan (Bali Post) -** Tim Saber Pungli Kabupaten Tabanan merilis hasil penyidikan kasus yang sedang ditangani. Dari empat kasus

hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), hanya satu kasus yang sudah P21 (berkasnya lengkap) dan satu kasus dalam proses penyidikan. Sementara

dua kasus lainnya dihentikan. Kedua kasus yang di SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) yakni OTT pungutan di pasar senggol dan



**RILIS KASUS - Tim Saber Pungli Kabupaten Tabanan saat merilis hasil penyidikan kasus.** Bali Post/kmb28

parkir di Terminal Pesiapan. Ketua pelaksana Tim Saber Pungli Tabanan Kopol Leo Martin Pasaribu, Jumat (7/7) kemarin menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan termasuk mendatangkan ahli, kedua kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemerasan. Oleh karena itu kasusnya dihentikan. Sedangkan satu kasus yang berkasnya sudah lengkap dan dinyatakan sudah P21 oleh kejaksaan yakni kasus pungli di areal parkir transit Pasar Tabanan, di mana tersangkanya berinisial I Made BA (48) asal Banjar Sandan Dauh Yeh, Desa Sesandan, Tabanan. Seperti diketahui, untuk tersangka I Made BA diamankan awal Februari 2017. Pelaku kedapatan memungut retribusi karcis parkir kendaraan roda empat di areal parkir transit Pasar Tabanan sebesar Rp 4.000, semestinya Rp 2.000. "Ada tiga perkara yang

kami tangani, dua di antaranya sudah SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Kami sudah minta agar bendesa adat bisa mengambil tindakan kepada yang bersangkutan. Satu kasus lainnya sedang berjalan," beber Kopol Leo.

Untuk kasus yang sedang dalam tahap penyidikan, yakni OTT melibatkan anggota ormas saat melakukan pungutan liar I Ketut M (41) dan I Wayan S (23). Mereka memungut uang Rp 310.000 di sejumlah pedagang kaki lima di wilayah Kediri, Tabanan. Keduanya diamankan saat melakukan aksinya, pertengahan Juni lalu.

"Penanganan terhadap perkara selalu kita gunakan asas praduga tak bersalah. Kita kaji berdasarkan undang-undang yang berlaku, bahkan melibatkan ahli bahasa untuk mengetahui apakah ada unsur pemerasan dalam kasus tersebut," ucapnya. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 8 Juli 2017

Hal : 14